

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan di negara ini. Untuk mengembangkan hal tersebut diperlukan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem politik yang demokratis menurut Henry B. Mayo (Budiardjo, 1992:61), dalam buku *Introduction to Democratic* memberikan definisi demokrasi sebagai berikut:

Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Demokrasi didasari beberapa nilai menurut Henry B. Mayo sebagaimana yang dikutip Budiardjo (1992:62-63), nilai-nilai tersebut yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).

4. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
5. Menjamin tegaknya keadilan.

Nilai-nilai demokrasi di atas menurut Budiardjo (1992:63:62), dalam pelaksanaannya perlu diselenggarakan beberapa lembaga yaitu, 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab, 2. Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, 4. Pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapat, dan 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Lembaga-lembaga di atas diperlukan untuk menuju suatu pemerintahan yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia pada saat ini adalah demokrasi berdasarkan Pancasila.

Keberhasilan politik di suatu negara bukan hanya diukur dengan adanya pemilu, lembaga-lembaga pemerintahan seperti Presiden, MPR, DPR, dan lain-lain. Keberhasilan politik suatu negara dapat diukur dengan kedewasaan politik warga negaranya, seperti tidak ada lagi *money* politik, tidak ada orang-orang yang hanya mementingkan partai sendiri sedang partai lain adalah musuh, pawai jalanan yang membuat resah masyarakat dan lain-lain. Untuk menuju kedewasaan politik bagi warga negara Indonesia harus diadakan pendidikan politik. Pendidikan politik dapat diberikan kepada masyarakat, generasi muda dan mahasiswa.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam pendidikan formal (di sekolah) mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki peran penting untuk pendidikan politik. Hal ini sesuai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 dan No.23 Tahun 2006 adalah:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Badan Standar Nasional Pendidikan:110).

Dengan adanya tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, siswa diajarkan untuk bersikap kritis dalam menanggapi isu Kewarganegaraan serta menjadi pribadi yang anti korupsi sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, pendidikan politik juga terdapat dalam ruang lingkup mata pelajaran PKn sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan nasional tahun 2006 meliputi:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

5. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi (Badan Standar Nasional Pendidikan:110-111).

Pendidikan politik sangatlah penting hal ini sesuai pernyataan Hatta sebagaimana dikutip oleh Hermawan (2001:4), sebagai berikut:

Pendidikan politik dilakukan supaya keinsyafan rakyat akan hak dan harga dirinya bertambah kuat dan pengetahuannya tentang politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas. Dengan ini Indonesia akan menjadi pemerintahan yang berdasar kerakyatan dan kebangsaan bersandar kepada rakyat dan takluk pada keinginan rakyat.

Pendidikan politik dapat dilakukan oleh partai politik hal ini sesuai dengan UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 2 ayat (4) bahwa salah satu syarat pembentukan partai politik dalam AD (Anggaran Dasar) harus memuat mengenai pendidikan politik. Meskipun demikian, pendidikan politik juga dapat disalurkan melalui media massa dan LSM (Sutarso, 2001:3). Media massa merupakan salah satu media dalam sosialisasi pendidikan politik. Media massa dapat berupa radio, surat kabar, film, novel-novel dan bentuk komunikasi lain.

Film merupakan media komunikasi massa yang bukan hanya untuk hiburan semata tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. Film merupakan bagian penting dalam pendidikan politik bagi bangsa ini. Bentuk pendidikan politik

dalam film dapat berupa penerangan mengenai politik, kritik politik terhadap pemerintah dan lain-lain. Kritik politik dalam film dapat disampaikan secara serius atau bahkan dengan *satire* politik. Salah satu film tersebut adalah film berjudul *Alangkah Lucunya Negeri Ini* dengan *genre* komedi *satire* khas Deddy Mizwar yang memotret realitas sosial yaitu masalah pendidikan, kemiskinan, korupsi, anak jalanan, pengangguran, dan protes-protes sosial.

Muluk (Reza Rahardian) seorang sarjana muda yang menganggur setelah lulus kuliah. Suatu hari Muluk bertemu dengan seorang bocah di pasar sedang mencopet. Perjumpaan Muluk dan Komet (Angga), mempertemukan sarjana muda itu dengan Jarot (Tio Pakusadewo) yang merupakan bos para pencopet. Jarot dengan rapi mengorganisir sekelompok pencopet yang berjumlah 16 anak di bawah umur dan membagi kedalam tiga kelompok copet yang terdiri dari copet pasar, copet mall dan copet angkot. Muluk kemudian mengusulkan untuk mengelola uang para copet tersebut, yaitu dengan meminta 10% hasil copetan untuk di tabung sehingga para pencopet mampu membuat usaha sendiri dan tidak mencopet lagi.

Hal pertama yang dilakukan Muluk adalah membeli motor sebagai sarana transportasi menuju markas, kemudian mulai mengajak Samsul (Asrul Dahlan) dan Pipit (Tika Bravani) untuk menjadi guru bagi para pencopet. Samsul (Asrul Dahlan) sarjana pendidikan yang juga masih menganggur, setiap hari dihabiskan dengan bermain gable di gardu hansip, sedangkan Pipit (Tika Bravani) yang merupakan anak ustad Haji Rahmat (Slamet Rahardjo) memiliki kebiasaan mengikuti kuis-kuis di TV dan mengirimkan undian berhadiah. Ketiga sahabat

tersebut akhirnya menjalankan proyek yang diberi nama oleh Muluk proyek pengentasan kemiskinan. Ketiga sahabat ini tanpa lelah mencoba mengubah pola pikir para pencopet ini agar tidak lagi mencopet. Ketiga sahabat tersebut kemudian mengajari para pencopet cilik yaitu menulis, membaca, berhitung, Pancasila dan UUD 1945 serta mengajarkan agama islam. Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengkaji “Wacana Pendidikan Politik melalui *Satire* Politik dalam Film Alangkah Lucunya Negeri Ini (Analisis Semiotik terhadap Film Alangkah Lucunya Negeri Ini)”.

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Konstruksi Wacana Pendidikan Politik melalui *Satire* Politik dalam Film Alangkah Lucunya Negeri Ini?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai

langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan profil film Alangkah Lucunya Negeri Ini.
2. Untuk mendeskripsikan konstruksi wacana pendidikan politik melalui *satire* politik dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pada umumnya, mengenai wacana pendidikan politik melalui *satire* politik pada mahasiswa dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini.
- b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai pendidikan politik melalui *satire* politik pada mahasiswa.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan yang berguna bagi mahasiswa terhadap nilai-nilai politik yang terdapat di film Alangkah Lucunya Negeri Ini.
- b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik.
- c. Sebagai media pembelajaran pendidikan politik bagi guru PKn.

E. Daftar Istilah

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai wacana pendidikan politik melalui *satire* politik dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini (analisis semiotik terhadap film Alangkah Lucunya Negeri Ini). Oleh karena itu, peneliti perlu mengetahui definisi wacana, pendidikan, wacana pendidikan politik, *satire*, politik, film dan analisis semiotik.

1. Wacana. Menurut Samsuri sebagaimana dikutip oleh Sobur (2006:10), pengertian wacana sebagai berikut:

Wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian satu dengan pengertian yang lain. Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula menggunakan bahasa tulisan.

2. Pendidikan Politik. Alfian sebagaimana dikutip Haricahyono (1986:203), mengartikan Pendidikan politik sebagai berikut:

Pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

3. Wacana Pendidikan Politik. Berdasarkan pengertian wacana dan pendidikan politik maka dapat disimpulkan pengertian wacana pendidikan politik adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat.
4. *Satire*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1002), *satire* adalah “1) (*Sas*) gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang 2) sindiran atau ejekan”.

5. Politik. Menurut Muhtadi (2008:28), politik sebagai “tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau urusan publik”.
6. Film. Menurut Ardianto dan Lukiati (2005:134), film adalah “karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang yang bertujuan untuk memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna”.
7. Analisis Semiotika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:37), analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”. Sementara itu, pengertian semiotik menurut Eco sebagaimana dikutip Sobur (2006:95), semiotik adalah “ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda”. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa analisis semiotika adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya yang berkenaan dengan tanda, kode, penandaan, serta penggunaannya yang ada dalam kehidupan masyarakat.